

QUASI INDEPENDENSI MEDIA, CERMIN RETAK PERS KITA

Moehammad Gafar Yoedtadi¹, Ahmad Djunaidi², Yugih Setyanto³ &
Lusia Savitri Setyo Utami⁴

¹Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: gafary@fikom.untar.ac.id

²Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: ahmadd@fikom.untar.ac.id

³Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: yugihs@fikom.untar.ac.id

⁴Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: lusias@fikom.untar.ac.id

ABSTRACT

The political year is a test for television media in Indonesia in implementing professional and independent journalism. Reflecting on previous elections and presidential elections, it is difficult to expect television media to be independent from the political interests of media owners. A number of television stations are owned by entrepreneurs who are affiliated with political parties and support the 2024 presidential and vice presidential candidates. This research aims to explain the meaning of television journalists regarding media independence ahead of the 2024 general election and presidential election. This research uses a qualitative approach with phenomenological research method to understand the construction meaning of journalists. The object of this research is the meaning of television journalists regarding media independence ahead of the 2024 general election and presidential election. The research subjects were television journalists from two media groups, ABC and XYZ, who were selected purposively. The research data was analyzed using media political economy theory. The research results show that there are differences in the subjective meaning of media independence among television journalists. They agree on the importance of media independence in maintaining press freedom, but differ in their views on the involvement of media owners in editorial policy. Some journalists understand the intervention of media owners as normal. Others believe that the media owner's intervention has violated the journalistic code of ethics. Different views are also seen regarding the implementation of media independence. Some consider a form of media independence to be the media's freedom to side with a political party or a presidential and vice presidential candidate that has the same vision as the editorial team. Meanwhile, other journalists believe that media independence must be realized through a neutral and impartial attitude.

Keywords: *phenomenology, media, independent, television, journalist*

ABSTRAK

Tahun politik menjadi ujian bagi media televisi di Indonesia dalam menerapkan jurnalisme yang profesional dan independen. Berkaca dari pemilu dan pilpres sebelumnya, sulit mengharapkan media televisi bersikap independen dari kepentingan politik pemilik media. Sejumlah stasiun televisi dimiliki oleh pengusaha yang memiliki afiliasi dengan parpol dan mendukung paslon presiden dan wakil presiden 2024. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemaknaan jurnalis televisi terhadap independensi media menjelang pemilu dan pilpres 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian fenomenologi untuk memahami konstruksi makna para jurnalis. Objek penelitian ini adalah pemaknaan jurnalis televisi terhadap independensi media menjelang pemilu dan pilpres 2024. Subjek penelitian adalah para jurnalis televisi dari dua grup media, ABC dan XYZ yang dipilih secara purposive. Data-data penelitian dianalisis menggunakan teori ekonomi politik media. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan atas makna subjektif mengenai independensi media di antara para jurnalis televisi. Mereka bersepakat mengenai pentingnya independensi media dalam menjaga kemerdekaan pers, tetapi berbeda pandangan terhadap keterlibatan pemilik media dalam kebijakan editorial. Sebagian jurnalis memahami campur tangan pemilik media sebagai hal yang wajar. Sebagian lagi menilai intervensi pemilik media telah melanggar kode etik jurnalistik. Pandangan yang berbeda juga terlihat mengenai implementasi independensi media. Sebagian menganggap bentuk independensi media adalah kebebasan media untuk berpihak pada parpol atau paslon presiden dan wakil presiden yang memiliki visi yang sama dengan redaksi. Sedangkan jurnalis lain berpandangan independensi media harus diwujudkan dengan sikap netral dan tidak berpihak.

Kata Kunci: fenomenologi, independen, media, jurnalis, televisi

1. PENDAHULUAN

Tahun politik menjadi ujian bagi media televisi di Indonesia dalam menerapkan jurnalisme yang profesional dan independen. Berkaca dari pemilu dan pilpres sebelumnya, sulit mengharapkan media televisi bersikap independen dari kepentingan politik pemilik media. Beberapa media massa terutama televisi dimiliki oleh para pengusaha yang mendirikan partai politik. Hasil studi yang dilakukan oleh Dewan Pers dan Masyarakat Peduli Media (MPM) menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 menunjukkan bahwa sejumlah media massa memperlihatkan kecenderungan mendukung kontestan tertentu (Wicaksana, 2015). Khususnya, media massa yang dimiliki oleh individu dengan afiliasi politik. Dari penelitian MPM teridentifikasi perbedaan yang signifikan antara media yang dimiliki oleh mereka yang terafiliasi dengan partai politik/calon presiden/calon wakil presiden dan yang tidak memiliki afiliasi. Temuan dari penelitian MPM menunjukkan adanya relasi hegemonik antara pemilik media yang memiliki status sebagai politikus dengan media yang berada di bawah kendalinya.

Harapan agar media bersikap independen dari kepentingan pemilik media sejatinya telah diamanatkan pasal satu Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menyajikan berita yang akurat, berimbang dan tidak berniat buruk. Interpretasi pasal satu mengklarifikasi bahwa independen berarti melaporkan peristiwa atau fakta sesuai dengan nurani tanpa intervensi, tekanan, atau campur tangan dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers (Dewan Pers, 2023). Konsekuensi pasal tersebut menegaskan perlunya media menunjukkan ketidakberpihakan dan keberimbangan saat menyampaikan berita sebagai bagian dari sikap independensinya. Oleh karena itu, menjaga independensi media menjadi krusial guna memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dalam penyajian berita (Kurniawan, 2019).

Sebagai perbandingan terdapat beberapa kajian yang telah meneliti mengenai independensi pemberitaan pers pada masa pemilu. Namun, menurut pengamatan penulis belum terdapat penelitian yang khusus menggali perspektif jurnalis mengenai independensi dalam pemberitaan pemilu 2024. Kajian Salma dan Sobur (2020) dilakukan untuk mengungkap bagaimana media *online* K dan R menjaga independensi dalam melaporkan pemilihan presiden 2019. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis.. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis dari sisi momentum Pemilu 2024, jenis media massa dan metode penelitian. Kajian Noerdin (2020) berfokus pada tujuan untuk menjelaskan dampak konglomerasi media terhadap pemberitaan pemilu 2014 dan 2019 di T dan M. Penelitian tersebut memiliki fokus yang hampir sama dengan penelitian penulis, tetapi berbeda dalam memilih metode penelitian. Riset tersebut menggunakan metode studi kasus dengan kajian pustaka, sedangkan penelitian penulis memilih metode fenomenologi dan wawancara dengan para jurnalis televisi. Kajian Susanto (2021) Penelitian ini menyoroti bagaimana redaksi T menerapkan prinsip independensi, mempertahankan kredibilitas, dan menjaga integritas wartawan mereka sebagai bagian dari strategi bisnis media di era digital. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis yakni pada subjek penelitian. Jika penelitian tersebut memilih subjek penelitian media T, maka subjek penelitian penulis adalah media massa yang pemiliknya terafiliasi partai politik (ABC dan XYZ). Penelitian tersebut juga berbeda dalam metode penelitian yang menggunakan studi kasus, sedangkan penelitian penulis menggunakan fenomenologi. Penelitian Muchlis (2021) menguraikan tren dalam konten pesan politik yang disampaikan melalui program berita di stasiun televisi T, M, dan R menjelang pemilihan presiden 2019 di Indonesia. Secara substantif penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam tema besar dengan penelitian penulis yakni independensi pemberitaan televisi pada pemilihan presiden. Namun, berbeda dalam metode penelitian, riset tersebut memilih analisis isi berita,

sedangkan penelitian penulis berfokus pada fenomenologi jurnalis dalam memaknai independensi dalam pemberitaan pemilu 2024.

Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya terlihat bahwa penelitian independensi media lebih dominan menelaah peran konglomerasi media dalam mempengaruhi pemberitaan pemilu. Penelitian sebelumnya juga cenderung dominan menggunakan studi pustaka, studi kasus dan analisis isi media. Penelitian penulis menggunakan metode fenomenologi dengan tujuan menjelaskan independensi media dalam pemberitaan pemilu dan pemilihan presiden 2024 dari perspektif para pelakunya yakni para jurnalis di dua grup media massa yang pemiliknya terafiliasi dengan partai politik (ABC dan XYZ). Dipilihnya jurnalis sebagai subjek penelitian karena penulis berpandangan independensi media sangat ditentukan oleh interpretasi yang dilakukan oleh jurnalis terhadap suatu realitas. Independensi media juga terkait dengan aspek individual dari para jurnalis. Berdasarkan latar belakang di atas riset ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana pemaknaan jurnalis televisi terhadap independensi media dalam pemberitaan pemilu dan pilpres 2024?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2018) yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan pengalaman individu terkait suatu fenomena dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan tujuan menjadi sebuah studi interpretatif untuk mengeksplorasi masalah penelitian yaitu memperoleh pemahaman yang menyeluruh pemaknaan jurnalis terhadap independensi media.

Metode penelitian menggunakan fenomenologi. Tujuan fenomenologi pada dasarnya adalah melihat secara dekat fenomena yang diteliti untuk mengeksplorasi dunia pengalaman hidup yang kompleks dari sudut pandang para aktor atau mereka yang menjalaninya (Qutoshi, 2018). Fenomenologi merupakan metode penelitian di mana peneliti mengenali inti atau esensi dari pengalaman manusia terkait dengan suatu kejadian khusus (Creswell, 2018). Objek penelitian adalah pemaknaan jurnalis televisi terhadap independensi media menjelang pemilu dan pilpres 2024. Subjek penelitian adalah jurnalis televisi dari dua grup media (ABC dan XYZ) yang dimiliki oleh konglomerat yang memiliki afiliasi dengan partai politik. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan enam jurnalis yang dipilih secara *purposive* dengan kriteria jurnalis pada level penentu kebijakan editorial, yaitu produser program, pemimpin redaksi hingga direktur pemberitaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian terjadi perbedaan pemaknaan di antara para informan mengenai implementasi dari konsep independensi media. Khususnya mengenai keterlibatan pemilik media. Sebagian menilai keikutsertaan atau campur tangan pemilik media dalam menentukan kebijakan editorial merupakan hal yang wajar karena menganggap pemilik media bagian dari redaksi. Sementara ada yang memiliki pandangan bahwa campur tangan pemilik media terhadap kebijakan redaksi dianggap bentuk intervensi yang berlebihan. Mereka berpendapat campur tangan pemilik media sebaiknya hanya sebatas memberikan pendapat saja dan tidak memaksakan hingga menentukan kebijakan editorial.

Perbedaan pandangan tersebut tidak saja dikemukakan oleh para jurnalis yang bekerja pada grup media yang berbeda, tetapi diungkapkan pula oleh para jurnalis yang bekerja pada grup media yang sama. Sebagaimana diungkapkan oleh informan yang bekerja di salah satu grup media,

bahwa kebijakan redaksi media mutlak mengikuti arahan dari pemilik media. Menurut informan tersebut, para jurnalis yang bekerja di grup media tersebut seyogyanya telah menyadari dari sejak awal bekerja bahwa campur tangan pemilik media dalam mengatur kebijakan redaksi merupakan hal yang tidak bisa ditolak. Salah seorang informan mengatakan bahwa bagi jurnalis yang menolak campur tangan pemilik, maka redaksi mempersilahkan untuk keluar dari media tempatnya bekerja.

Menurut informan, pemilik media mempunyai hak ikut mengatur kebijakan redaksi jaringan media miliknya. Termasuk kebijakan redaksi untuk mendukung partai politik yang didirikannya. Diakui oleh informan tersebut bahwa pemberitaan di televisinya menjelang Pemilu 2024 sangat kental diwarnai dukungan terhadap parpol yang berafiliasi dengan pemilik media. Menurut informan tak ada berita di televisinya yang mengkritisi parpol tersebut. Semua berita mengenai parpol itu bernada positif.

Selain itu, hampir tidak ada ruang berita yang disediakan untuk parpol lain, kecuali parpol yang berkoalisi dengan partai politik pemilik media. Ditegaskan oleh informan yang bekerja pada grup media ABC dan XYZ bahwa hampir tidak ada slot berita sama sekali untuk lawan politik pemilik media. Meskipun peristiwa yang melibatkan paslon lain memiliki nilai berita yang tinggi, kegiatan untuk paslon yang lain tidak akan ada liputan dan pemberitaannya.

Pendapat yang berbeda dilontarkan oleh informan lain. Menurut informan tersebut campur tangan pemilik media terhadap kebijakan redaksi merupakan hal yang tidak sepatutnya dilakukan karena bertentangan dengan kode etik jurnalistik. Dalam kode etik jurnalistik telah diatur independensi media bebas dari pengaruh, tekanan dan campur tangan pemilik perusahaan pers. Namun informan tersebut mengakui sulit bagi jurnalis di mediana untuk menolak hal tersebut karena telah menjadi aturan tidak tertulis untuk mematuhi arahan dan keinginan dari pemilik media. Posisi informan adalah produser program berita yang masih memiliki atasan yang lebih tinggi lagi, antara lain produser eksekutif, manajer departemen dan pemimpin redaksi. Sebagai produser program berita, informan harus patuh terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh para atasannya. Informan mengakui upaya untuk menawar kebijakan pemberitaan yang tidak didasari prinsip independensi tersebut sudah dilakukan, tetapi tidak pernah berhasil.

Jabatan informan pada akhirnya menentukan sikap terhadap prinsip independensi media. Jurnalis yang bukan pada posisi tertinggi dalam hirarki redaksi lebih bersikap kritis terhadap campur tangan pemilik media. Sedangkan jurnalis yang menduduki posisi puncak dalam struktur redaksi, bersikap kooperatif dengan kepentingan politik pemilik media. Oleh karena itu, jurnalis yang tidak setuju terhadap sikap pemilik tidak memiliki posisi tawar yang kuat mengingat jabatan mereka tidak begitu tinggi. Meskipun mereka menyadari praktik tersebut merupakan hal yang keliru.

Upaya untuk keluar dari kebijakan mendukung kepentingan politik pemilik media terkadang masih dapat dilakukan ketika kepentingan ekonomi jauh lebih kuat untuk diprioritaskan. Kepentingan ekonomi televisi ditentukan oleh *rating* program. Tingginya perolehan *rating* berkorelasi dengan jumlah iklan yang masuk. Pertimbangan *rating* dan iklan biasanya menjadi penawar bagi kebijakan politik pemilik media. Seorang informan penelitian yang menjadi produser program berita siang mengatakan bahwa program berita yang dikelolanya memiliki pemirsa setia dari kalangan perempuan dan ibu rumah tangga, sehingga berita-berita politik amat jarang ditayangkan pada program beritanya karena dari hasil survei menunjukkan berita politik akan menurunkan *rating*. Apalagi program berita yang dikelolanya menjadi acara unggulan

dalam meraih rating televisi. Berita-berita politik pesanan pemilik media sering kali ditolak untuk ditayangkan dengan alasan *rating*.

Pemaknaan independensi media bagi sebagian jurnalis memiliki keragaman jika ditinjau dari aspek netralitas dan keberimbangan. Seorang jurnalis berpendapat bahwa independensi media bukan berarti harus bersikap netral dan berimbang. Menurutnya bersikap tidak netral dan tidak berimbang tidak dapat dipersoalkan karena merupakan bagian dari independensi media. Independensi media berarti media memiliki hak menentukan sikap, baik netral atau tidak netral dan berpihak atau tidak berpihak. Oleh karena itu, redaksi bebas mendukung parpol dan paslon sepanjang memiliki visi dan tujuan yang sesuai dengan visi redaksi. Otomatis parpol dan paslon tersebut mendapat porsi pemberitaan yang lebih banyak dan lebih positif. Sebaliknya bagi parpol dan paslon yang dinilai tidak memiliki visi dan tujuan yang searah dengan visi redaksi akan mendapat porsi pemberitaan kecil, bahkan bisa jadi sama sekali tidak akan diliput. Sedangkan jurnalis lain melihat keberimbangan dan netralitas masih tetap harus dipertahankan ketika media memberitakan kontestasi antar parpol dan paslon. Menurutnya independensi media akan terefleksi ketika pemberitaannya berimbang dan tidak berpihak. Alasan informan kepercayaan masyarakat akan hilang ketika pemberitaan media cenderung berpihak dan tidak netral.

Independensi media yang dipahami secara kolektif berasal dari prinsip-prinsip demokrasi liberal. Kebebasan pers dianggap sebagai komponen utama dalam berfungsinya masyarakat demokratis (Bennett, 2015). Media berfungsi sebagai pengawas terhadap tiga cabang kekuasaan dalam trias politika, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam konteks ini, media massa yang mandiri dianggap sebagai pilar keempat (Márquez-Ramírez et al., 2020). Pers sebagai pilar keempat (*fourth estate*) merupakan salah satu elemen penting dalam mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan yang demokratis, serta penting untuk perlindungan hak-hak sipil dan politik (Kalogeropoulos et al., 2022).

Dalam pemaknaan subjektif terhadap prinsip independensi tersebut terjadi perbedaan di antara para jurnalis. Khususnya pada peran pemilik media dalam mengatur kebijakan editorial. Sebagian menerima dan sebagian menolak. Akar permasalahannya adalah pemahaman terhadap peran pemilik media, apakah sebatas sebagai pemodal dengan tujuan bisnis murni atau turut serta dalam menentukan kebijakan editorial yang lebih mencerminkan kepentingan politik pribadi.

Sejak lama telah disadari bahwa kendala bagi para jurnalis dalam mewujudkan independensi media, terutama sebagai pilar keempat demokrasi yang selalu bersikap kritis adalah dominasi peran pemilik media. Sebagaimana diungkapkan oleh Tapsell (dalam Luddy, 2022) bahwa konglomerasi media menjadi problem utama dalam mencapai otonomi dalam pekerjaan jurnalistik, terkait dengan keputusan mengenai informasi yang harus atau tidak harus diberitakan, serta bagaimana media membungkus berita. Tapsell (2018) mengidentifikasi tiga tren signifikan terkait oligarki media di Indonesia. Pertama, pemilik media semakin kuat secara politik. Kedua, kekayaan pemilik media cenderung meningkat. Ketiga, perusahaan media menunjukkan kecenderungan menjadi dinasti, di mana banyak anak pemilik media menempati posisi strategis di ruang redaksi, seperti CEO media digital atau pemimpin redaksi. Akibatnya, media arus utama di Indonesia menjadi lebih partisan. Gambaran ini mencerminkan bahwa kepentingan pemilik media, baik di bidang politik maupun bisnis, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada produk jurnalistik.

Independensi media sangat bergantung pada relasi antara jurnalis dan pemilik media. Mengacu kepada teori ekonomi politik media, Terjadi ketimpangan hubungan dimana jurnalis hanya

ditempatkan sebagai alat produksi dalam industri media. Pemilik media melakukan komodifikasi tenaga kerja terhadap jurnalis (Yoedtadi et al., 2021). Komodifikasi adalah elemen krusial dalam kerangka teori ekonomi politik media. Komodifikasi memperlihatkan bagaimana sistem ekonomi politik media massa yang bersifat kapitalis berupaya mencapai keuntungan ekonomi sekaligus politik (Knoche, 2023).

Independensi dirumuskan oleh Kovach dan Rosenstiel sebagai elemen keempat dari sembilan elemen jurnalisme (Yoedtadi & Pribadi, 2018). Elemen keempat menegaskan bahwa jurnalis harus mempertahankan independensi dari pihak yang menjadi fokus liputannya. Dengan kata lain, kewajiban utama jurnalisme adalah mencari kebenaran, dan jurnalis diharapkan menjaga independensinya dari subjek berita. Hal itu menunjukkan bahwa seorang jurnalis seharusnya mampu bekerja secara obyektif dan independen.

Prinsip media yang independen menegaskan bahwa pers Indonesia mengikuti prinsip-prinsip jurnalisme yang bersifat universal, yang berakar pada perspektif demokrasi, bukan mengedepankan jurnalisme sebagai alat propaganda (Wicaksono, 2015). Pers Indonesia tidak berperan sebagai propaganda, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6a Undang-Undang Pers, di mana perannya adalah memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (Prasetyo, 2018). Pemahaman keliru jurnalis terhadap independensi media patut disayangkan karena merusak idealisme profesi sebagai pelayan publik. Sebagaimana disimpulkan hasil kajian Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bahwa telah terjadi dekadensi komitmen etis para jurnalis sebagai akibat relasi kuasa yang tidak seimbang antara jurnalis dan pemilik media, maupun oleh ambisi karier personal jurnalis (Masduki et al., 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemaknaan terhadap independensi media berbeda-beda di antara para jurnalis yang bekerja pada media massa yang pemiliknya terafiliasi dengan partai politik. Campur tangan pemilik media massa terhadap arah pemberitaan sebagian diterima sebagai hal yang wajar, sementara sebagian melihat sebagai bentuk intervensi terhadap independensi media.

Pandangan yang berbeda juga terlihat pada pendapat bagaimana independensi media dipraktikkan. Sebagian menganggap bentuk independensi media adalah kebebasan media untuk berpihak pada parpol atau paslon presiden dan wakil presiden siapa pun sepanjang memiliki visi yang sama dengan redaksi. Sedangkan jurnalis lain berpandangan independensi media bukan berarti media bebas menentukan pilihan, tetapi independensi media harus diwujudkan dengan netralitas dan tidak berpihak.

Pemahaman yang berbeda-beda itu menunjukkan jurnalis belum sepenuhnya memahami prinsip independensi media, terutama dalam pemberitaan politik. Pertentangan makna tersebut dapat menggambarkan bahwa prinsip independensi media belum mampu sepenuhnya dipraktikkan para jurnalis pada Pemilu 2024 (quasi independensi media). Riset ini hendaknya dilanjutkan dengan meneliti isi media televisi yang terafiliasi dengan kepentingan politik pemilik media untuk membuktikan sejauh mana pelanggaran kode etik jurnalistik pada prinsip independensi yang dilakukan oleh para jurnalis.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Universitas Tarumanagara yang telah membiayai penelitian ini. Terima kasih kepada para jurnalis yang telah menjadi informan penelitian ini.

REFERENSI

- Bennett, J. (2015). *Media independence working with freedom or working for free?* (James Bennet & Niki Strange, Eds.). Routledge.
- Creswell, J. W. C. J. D. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage.
- Dewan Pers. (2023). *Buku saku wartawan edisi ke 18* (Vol. 18). Dewan Pers.
- Kalogeropoulos, A., Toff, B., & Fletcher, R. (2022). The watchdog press in the doghouse: a comparative study of attitudes about accountability journalism, trust in news, and news avoidance. *The International Journal of Press/Politics*, 29(2), 485-506. <https://doi.org/10.1177/19401612221112572>.
- Knoche, M. (2023). Media, journalism, and the public sphere in private family ownership. on the critique of the political economy of capitalist media enterprises. *TripleC*, 21(2), 92–106. <https://doi.org/10.31269/triplec.v21i2.1465>.
- Kurniawan, Y. F. (2019). Independensi media dalam pemberitaan reuni aksi 212: Studi fenomenologis koran lokal radar banyumas. *El Haram*, 4(2), 19–25.
- Luddy, C. (2022). Konglomerasi media memperkuat hegemoni penguasa dan oligarki pada era new media. *At Tawasul Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.51192/ja.v2i1.352>.
- Márquez-Ramírez, M., Mellado, C., Humanes, M. L., Amado, A., Beck, D., Davydov, S., Mick, J., Mothes, C., Olivera, D., Panagiotu, N., Roses, S., Silke, H., Sparks, C., Stepínska, A., Szabó, G., Tandoc, E., & Wang, H. (2020). Detached or interventionist? comparing the performance of watchdog journalism in transitional, advanced and non-democratic countries. *The International Journal of Press/Politics*, 25(1), 53–75. <https://doi.org/10.1177/1940161219872155>.
- Masduki, M., Zuhri, S., Utomo, W. P., Edvra, P. A., Rahayu, R., Tristi, M. A., Wendratama, E., Paramastri, M. A., Kurnia, N., Adiputra, W. M., Rianto, P., Suci, P. L. N., & Aprilia, M. P. (2023). *Kepemilikan dan afiliasi politik media di indonesia*. Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media).
- Muchlis, M. (2021). Analisis pemberitaan politik tv one, metro tv dan rcti menjelang pemilihan presiden 2019 di indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 64–78.
- Noerdin, S. , S. A. , & H. (2020). Dampak praktik konglomerasi media terhadap independensi dan kebebasan pemberitaan media di indonesia. Studi kasus pemberitaan pilpres 1024 dan 2019 di tv one dan metro tv. *Perspektif*, 2(2), 214–224. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v2i3.242>.
- Prasetyo, Y. A. (2018). Wajah profesionalisme jurnalis kita. In A. Manan (Ed.), *Ancaman baru dari digital. Laporan AJI 2018* (pp. 39–50). Academia.
- Qutoshi, S. B. (2018). Phenomenology: A philosophy and method of inquiry. *Journal of Education and Educational Development*, 5(1), 215–2022. <https://doi.org/10.22555/joeeed.v5i1.2154>.
- Salma, K., & Sobur, A. (2020). Independensi media dalam pemberitaan pilpres di media massa online. *Prosiding Jurnalistik*, 6(1), 80–83.
- Susanto, E. (2021). Independensi media tempo dan pengaruh ekonomi politik dalam praktik strukturasi. *Pustaka Komunikasi*, 4(1), 24–38. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v4i1.1314>.
- Tapsell, R. (2018). *Kuasa media di Indonesia: Kaum oligarki, warga, dan revolusi digital*. Marjin Kiri.
- Wicaksono, A. P. (2015a). *Bayang-bayang pemilik dalam pemberitaan pemilu 2014*. Yayasan Tifa.

- Wicaksono, A. P. (2015b). *Bayang-bayang pemilik dalam pemberitaan pemilu 2014*. Yayasan Tifa.
- Yoedtadi, M. G., Loisa, R., Sukendro, G., Oktavianti, R., & Utami, L. S. S. (2021). Analisis komodifikasi kontributor dalam produksi berita televisi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 5(1), 213. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.9777.2021>.
- Yoedtadi, M. G., & Pribadi, M. A. (2018). Upaya redaksi televisi menjaga objektivitas dalam pemberitaan pilkada dki jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(2), 275-285. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i2.908>.